

p-ISSN 1978-6506
e-ISSN 2579-4868

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 11 No. 1 April 2018 Hal. 1 - 130

“IUS BONUMQUE”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
10. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.Si., Ph.D. (Hukum Lingkungan dan Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“IUS BONUMQUE”

Ungkapan di atas secara harfiah berarti hukum dan kebaikan. Kata “ius” dan “bonum” adalah kelompok kata benda. Kata-kata ini sudah sangat populer di dalam bahasa hukum, sehingga kita kenal juga beberapa kata berkaitan, seperti *justitia*, *justificatio*; *bonus*, *bonafide*, *probono*.

Hukum dalam makna yang paling umum merupakan suatu norma yang mengatur perilaku manusia (*human conduct*). Dalam tataran normatif tersebut, manusia harus diposisikan secara manusiawi. Salah satu dari karakter manusiawi itu adalah keterbatasan daya jangkau hukum untuk tidak sampai melewati garis nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sebagai contoh, hukum tidak diizinkan memproses kemudian menghukum seseorang lebih dari satu kali untuk satu kasus yang sama (asas *ne bis in idem*). Dalam rangka mencegah terlewatnya garis tersebut, hukum acara (*procedural law*) kemudian menetapkan asas-asas yang lebih teknis dan relatif terukur.

Tujuan hukum tidaklah sekali-kali menggiring hukum sebagai pengabdian formalisme, melainkan di ujung perjalanannya, ia harus bermuara pada kebaikan (*bonum*) yang substansial. Tatkala hukum berbicara tentang kebaikan, maka ia tak sekadar berkutat pada kepastian prosedural, yang lazim disebut dengan keadilan formal yang memang relatif lebih terukur. Hukum ternyata menelisik lebih dalam lagi, masuk ke relung-relung keadilan materiel dan/atau kemanfaatan empiris. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan dalam edisi kali ini mengulas tentang keadilan/kemanfaatan bagi istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga saat terjadi pembagian harta bersama; atau keadilan/kemanfaatan bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi berklausula baku. Dalam tulisan-tulisan yang lain, tidak selalu mudah untuk memilah antara hukum prosedural dan hukum materiel. Penafsiran atas konsep tata telantar, atau pengasuhan anak mumayiz, atau kewenangan atributif, misalnya, sama-sama berdimensi formal dan substansial sekaligus.

Hakim yang putusannya dikaji dalam jurnal ini diyakini adalah figur yang berkomitmen untuk mengedepankan penerapan hukum untuk kebaikan itu. Kepala putusan yang lazim ditetapkan secara tekstual berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Mahas Esa’ tidak boleh direduksi menjadi ‘demi hukum [positif]’. Kata-kata keadilan di sini lebih mendekati kebaikan di dalam hukum; suatu *ius bonumque*.

Demikianlah sekilas pengantar bagi Pembaca sekalian yang tengah menyimak Jurnal Yudisial kali ini. Selamat membaca!

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial



MENYOAL PENAFSIRAN TANAH TELANTAR	1 - 22
Kajian Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT	
Dian Aries Mujiburohman	
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta	
 ASAS <i>NE BIS IN IDEM</i> DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	 23 - 39
Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP	
Elisabeth Nurhaini Butarbutar	
Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, Medan	
 PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN	 41 - 53
Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT	
M. Beni Kurniawan	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta	
 KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK MUMAYIZ PASCA PERCERAIAN	 55 - 74
Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA	
Mansari & Reza Maulana	
Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh,	
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	
 KONFLIK KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AKIBAT PENENTUAN POKOK SENGKETA YANG BERBEDA	 75 - 89
Kajian Putusan Nomor 454/PDT.G/2005/PA.LMG	
dan Nomor 163/PDT.G/2008/PT.SBY	
Harijah Damis	
Pengadilan Agama Lamongan, Lamongan	
 PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU	 91 - 112
Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY,	
dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016	
M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani	
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	

**REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA 113 - 130**

Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016

Proborini Hastuti

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 11 No. 1 April 2018

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 631.44

Mujiburohman DA (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta)

Menyoal Penafsiran Tanah Telantar

Kajian Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT

Jurnal Yudisial 2018 11(1), 1 - 22

Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT merupakan putusan mengenai pembatalan keputusan penetapan tanah telantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT SMG. Pokok sengketa yang menjadi perdebatan dan tafsir dalam gugatannya adalah pengertian tanah telantar dan mengenai surat peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta implikasi pasca pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar oleh pengadilan tata usaha negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penafsiran pengertian tanah telantar dan penafsiran mengenai surat peringatan dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT, serta apa implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar pasca Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT? Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian tanah telantar terkait dengan frase “dengan sengaja” dan “tidak sengaja,” majelis hakim berpendapat bahwa hambatan pemanfaatan tanah karena menunggu proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan permasalahan tata ruang serta kendala terhadap pembebasan lahan dan proses ganti rugi disimpulkan sebagai unsur ketidaksengajaan. Implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar adalah tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

(Dian Aries Mujiburohman)

Kata kunci: surat keputusan penetapan, tanah telantar, putusan pengadilan.

UDC 347.922

Butarbutar EN (Fakultas Hukum, Unika Santo Thomas Sumatera Utara, Medan)

Asas *Ne Bis In Idem* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP

Jurnal Yudisial 2018 11(1), 23 - 39

Pengertian asas *ne bis in idem* adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, yang amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara. Sesuai dengan asas *ne bis in idem*, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak. Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga

tidak melanggar asas <i>ne bis in idem</i>. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas <i>similia similibus</i> dan asas <i>res judicata pro veritate habetur</i>, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat. (Elisabeth Nurhaini Butarbutar) Kata kunci: asas <i>ne bis in idem</i>, perkara yang sama, putusan hakim, perbuatan melanggar hukum.	yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (<i>double burden</i>) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga. (M. Beni Kurniawan) Kata kunci: harta bersama, kontribusi, keadilan.
UDC 347.625 Kurniawan MB (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta) Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 41 - 53 Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian	UDC 347.672.2 Mansari & Maulana R (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Kepastian Hukum terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 55 - 74 Anak yang telah mumayiz diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kesempatan untuk memilih harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan untuk menghindari konflik di kemudian hari antara kedua orang tuanya. Berbeda dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA yang tidak langsung menetapkan anak yang telah mumayiz diasuh oleh ibu atau ayahnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari demi memperebutkan anak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana aspek kepastian hukum terhadap pemeliharaan anak mumayiz dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan pilihannya? Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan datanya diperoleh melalui wawancara hakim dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak yang telah mumayiz. Hal ini dikarenakan anak yang berumur 14 dan 18 tahun tidak jelas berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak mumayiz

yang belum menentukan sikap/pilihan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika anak sudah menentukan pilihan dan memilih ibu sebagai pengasuhnya, maka ia wajib memelihara dan mengasuhnya hingga dewasa dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sebaliknya, jika ayah menjadi pilihannya, kewajiban mengasuh, merawat, dan menafkahi menjadi kewajibannya. (Mansari & Reza Maulana) Kata kunci: kepastian hukum, pengasuhan, perceraian, anak mumayiz.	perkara yang sudah diputus oleh pengadilan agama? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa yang harus diangkat oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama adalah keabsahan hibah dengan jalan pewarisan. Asas <i>ne bis in idem</i> tidak dapat diterapkan oleh pengadilan negeri dalam mengadili perkara tersebut karena putusan pengadilan agama belum berkekuatan hukum tetap. (Harijah Damis) Kata kunci: hibah, waris, kewenangan, peradilan, pokok sengketa.
UDC 347.91 DamisH(PengadilanAgamaLamongan,JawaTimur) Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Penentuan Pokok Sengketa yang Berbeda Kajian Putusan Nomor 454/PDT.G/2005/PA.LMG dan Nomor 163/PDT.G/2008/PT.SBY <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 75 - 89 Putusan Nomor 454/PDT.G/2005/PA.LMG menarik untuk dianalisis karena dua hal. <i>Pertama</i>, terkait dengan titik singgung kewenangan mengadili sengketa hibah/waris pada dua lembaga peradilan dengan adanya Putusan Nomor 163/PDT.G/2008/PT.SBY, dan <i>kedua</i>, tidak ada amar bersifat <i>condemnatoir</i> pada putusan tersebut. Adanya dua putusan pada dua lembaga peradilan yang saling berlawanan terhadap objek dan subjek yang sama menyebabkan penyelesaian perkara ini belum berakhir hingga kini dan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan walaupun perkara ini telah melalui proses panjang (sejak tahun 2005 sampai saat ini di tahun 2017). Untuk menganalisis masalah tersebut, ada dua masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Apakah pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam menerima dan mengadili perkara ini dapat dibenarkan menurut kompetensi absolut yang dimilikinya? Apakah asas <i>ne bis in idem</i> dapat diterapkan dalam hal pengadilan negeri mengadili	UDC 347.122 Syamsudin M & Ramadani FA (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT. SUS-BPSK/2016 <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 91 - 112 Kajian ini dilatarbelakangi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang memutus berbeda dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan gugatan pelanggaran klausula baku oleh pelaku usaha jasa kebugaran milik PT X. Permasalahannya adalah: 1) Apakah isi klausula baku yang tercantum dalam perjanjian anggota jasa kebugaran milik PT X dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?; 2) Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak jika dibandingkan dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Surabaya? Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausula baku

dalam perjanjian keanggotaan jasa kebugaran milik PT X telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, c, e, f, dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsekuensinya adalah batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung tidak tepat dan cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya. Ditinjau dari substansinya, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya lebih memenuhi rasa keadilan dan melindungi konsumen jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung. (M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani) Kata kunci: perlindungan konsumen, klausula baku, perjanjian keanggotaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan implikasi terhadap adanya reduksi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemilihan kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Indonesia. (Proborini Hastuti) Kata kunci: kewenangan atribusi, pemilihan kepala desa, hak uji materi.
UDC 353.2 Hastuti P (Fakultas Hukum, UPN Veteran, Surabaya) Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 113 - 130 Pemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan daerah tersebut berhenti berlaku setelah Mahkamah Agung melakukan hak uji materi dan menghasilkan Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 yang menyatakan peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis apakah Putusan Nomor 30 P/HUM/2016 memiliki dampak hukum terhadap kewenangan atribusi pemerintah daerah Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan.	

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 11 No. 1 April 2018

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 631.44 Mujiburohman DA (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta) A Question of Interpretation About Derelict Land An Analysis of Court Decision Number 24/G/2013/PTUN.JKT (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 1 - 22 Decision of State Administrative Court Number 24/G/2013/PTUN.JKT constitutes a ruling of the revocation of a derelict land settlement agreement derived from Cultivation Rights on behalf of SMG Company. The subject of the dispute debated in the interpretation of the lawsuit is the definition of derelict land and warning letters, as regulated in Article 8 of Government Regulation Number 11 of 2010 regarding Policies and Utilization of Derelict Land and the implications of post-revocation of derelict land stipulated decree by the Administrative Court. The formulation of the problem in this research is the interpretation of derelict land definition and warning letters in the Administrative Court Decision Number 24/G/2013/PTUN.JKT, as well as the implication of revocation of derelict land settlement agreement after the court decision issuance. Through normative legal research method with case study approach, it can be underlined that there is difference in interpretation of the definition of derelict land related to the phrase “intentionally” and “unintentionally”, in which the judges argue that barriers to land utility are the still-in-process request of forest areas acquisition, spatial problems and constraints to land acquisition, as well as the compensation process concluded as an element of inadvertence. The revocation of the settlement agreement makes it impossible to use the derelict land for benefit of the people and the state. (Dian Aries Mujiburohman)	Keywords: determination decree, derelict land, court decision. UDC 347.922 Butarbutar EN (Fakultas Hukum, Unika Santo Thomas Sumatera Utara, Medan) The Principle of Ne Bis In Idem in Tort Lawsuit An Analysis of Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 23 - 39 The notion of ne bis in idem principle states that the same case can not be tried for the second time. Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP has been previously determined and legally binding through Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, whose ruling stipulates that the plaintiff is the rightful holder of the case object. In accordance with ne bis in idem principle, Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP was supposed to be annulled. But the judge continued to prosecute and decided upon charges of tort/unlawful acts. This analysis aims to determine whether the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP is the same as that of Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, and judge’s legal considerations in determining the proof of unlawful acts. This study is a normative legal research, using secondary data as the object of analysis. The results of the analysis show that the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP with the Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, filed by and against the same parties, in the same relation, over the same object, yet the lawsuit argument between the two cases is different so it does not violate the principle of ne bis in idem. The consideration of the judge as the basis of Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP to set
--	--

out the element of unlawful acts is the principle of similia similibus and the principle of res judicata pro veritate habetur, stating that the defendant violates the plaintiff's subjective rights. (Elisabeth Nurhaini Butarbutar) Keywords: ne bis in idem principle, similar case, judge's ruling, tort/unlawful acts.	obligation to earn a living. A widow can get a greater share of a widower, if she gets a double burden of earning a living and taking care of the household. (M. Beni Kurniawan) Keywords: matrimonial property, contribution, justice.
UDC 347.625 Kurniawan MB (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta) Equitable Distribution of Matrimonial Property Based on the Contribution of Each Spouse An Analysis of Decision Number 618/PDT.G/2012/PA.BKT (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 41 - 53 Distribution of assets is set out in Article 97 of Islamic Law Compilation, in which a widow or widower is entitled to get half of their marital property. The distribution is fair when each spouse give the same amount of contribution during the course of marriage. Not least in the household, one party does not carry out the obligations, such as the husband who does not provide a living, nor the wife who does not take care of the household. The formulation of the problem is how equitable the distribution of matrimonial property based on the acquirement of the spouse during their course of marriage from the perspective of justice. This analysis uses normative juridical research method by studying the legislation related to the issue of matrimonial property and examining Court Decision Number 618/PDT.G/2012/PA.BKT. The results resolve that from the perspective of justice, the distribution of this joint property measured from both spouses' contribution in marriage is that a fair share does not necessarily have to be half split of 50 percent for the widower and half rest for the widowed wife. However, a widower could earn a smaller share of the widow if his acquirement is less during the course of marriage, and fail to fulfill his	UDC 347.672.2 Mansari & Maulana R (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Legal Certainty for Mumayiz Minors in Post-Divorce Custody An Analysis of Court Decison Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(3), 55 - 74 A Minor who has been mumayiz is given freedom to choose to live either with the mother or father. The decision should be explicitly stated in court decision to avoid future conflicts between the parents. In contrast, Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA did not in a straight line determine the status of a minor who has been mumayiz to be raised by either the mother or father. This could lead to legal dispute of fighting over the minor in the future. The question is how the legal certainty in the custody of minors with mumayyiz status in Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA and how the law provide protection for them who have not made their choice yet? This study is done by empirical research and the data collected through interviews of judges and the ruling of Syar'iyah Court of Banda Aceh. The results show that the Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA does not reflect legal certainty for the minors with the status of mumayiz. This is because the law does not set off that minors aged of 14 and 18 are in care of their mother or father. While the law has set for minors who have not mumayiz because of the existence of parenting to the mother has been confirmed in the verdict. Legal protection

for undecided custody of mumayiz minors will be obliged to their both parents to nurture and raise. If the child has made a choice and chooses the mother as the caregiver, then she is obliged to care and nurture the child to adulthood, and the father is obliged to provide a livelihood for the child. On the other hand, if the father becomes the child's choice, the obligation to care, nurture, and provide a livelihood becomes his duty. (Mansari & Reza Maulana) Keywords: legal certainty, custody, divorce, mumayiz minors.	of the study indicate that the subject of the dispute that should be examined by the district court as well as the religious court is the validity of the grant through inheritance. The district court cannot apply the nebis in idem principle in the proceedings as the decision of the religious court has not been permanently enforced. (Harijah Damis) Keywords: grant, inheritance, authority, judiciary, subject matter dispute.
UDC 347.91 DamisH(PengadilanAgamaLamongan,JawaTimur) Conflict of Court's Absolut Authority Due to Determination of Different Subject of Dispute An Analysis of Court Decision Number 454/PDT.G/2005/PA.LMG and Number 163/PDT.G/2008/PT.SBY (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 75 - 89 Court Decision Number 454/PDT.G/2005/PA.LMG is thought-provoking to examine for two things. Firstly, it is related to the authority tangency point in adjudicating grant/heir disputes at two judicial institutions with the Court Decision Number 163/PDT.G/2008/PT.SBY, and secondly, the ruling of the decision is not condemnatory. Two decisions on two opposing jurisdictions against the same object and subject cause the case to remain unresolved until now. There is no legal certainty for the justice seekers, although the case has gone through a long process (since 2005 until now in 2017). To analyze the problem, there are two main issues elaborated in this study. Could the legal considerations of a district court in accepting and adjudicating cases be justified according to their absolute competence? Could the principle of nebis in idem be applied in the case of a district court adjudicating a case which has been decided by a religious court? This research uses normative legal research methods. The results	UDC 347.122 Syamsudin M & Ramadani FA (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Legal Protection for Consumers in Term of the Implementation of Standardized Clause An Analysis of Court Decision Number 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, and Number 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2018 11(1), 91 - 112 The background of this study is related to the Supreme Court Decision which is contradicted the Decision of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) upheld by the Surabaya District Court in relation to the lawsuit regarding the violation of the standard clause by PT X. The legal questions are: 1) Does the standardized clause contained in the membership agreement of PT X violate the Article 18 of the Consumer Protection Law?; 2) Are the considerations of the Supreme Court Judge appropriate and do they reflect the justice values for the parties when compared with the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency and the Surabaya District Court? This study is a normative legal research done with case study and legislation review. The results indicate that the standardized clause in the membership agreement of PT X has violated the provisions of Article 18 paragraph (1) letters a, c, e, f, and g. The consequences is null and void. The Supreme

Court failed to consider and employ the legal facts in the ruling. By the content, the Decision of BPSK strengthened by the Surabaya District Court is likely more justifiable and protective compared to the Supreme Court Decision.

(M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani)

Keywords: consumer protection, standardized clause, membership agreement.

UDC 353.2

Hastuti P (Fakultas Hukum, UPN Veteran, Surabaya)

The Reduction of Administrative Government's Attribution Authority in Village Chief Election

An Analysis of Court Decision Number 30 P/HUM/2016 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2018 11(1), 113 - 130

Demak Regency Administrative Government made a regulation derived from Village Chief Election Regulation in Article 33 of Law Number 6 of 2014 regarding Village and transformed into Article 24 paragraph (1) of Demak Regency Regulation Number 5 of 2015 regarding Village Chief. The regional regulation ceased to take effect after the Supreme Court conducted a judicial review and ruled Decision Number 30 P/HUM/2016 stating that the regional regulation is in conflict with higher level regulations and therefore has no binding legal force. Based on this, it is necessary to analyze whether the Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2016 has a legal effect on the attribution authority of the Administrative Government of Demak Regency pursuant to Law Number 6 of 2014 regarding Village. This analysis is a normative legal research conducted using literature research. The result of the analysis shows that the Supreme Court Decision has implication to the reduction of attribution authority of the regional government in village chief election as part of managing governance in Indonesia.

(Proborini Hastuti)

Keywords: attribution authority, village chief election, right to judicial review.